



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES
KOMISI VIII DPR RI
KE KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
MASA PERSIDANGAN V
TAHUN SIDANG 2021 – 2022
TANGGAL 1-5 AGUSTUS 2022**



Sekretariat Komisi VIII DPR RI
Set_komisi8@dpr.go.id

**JAKARTA
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

JADWAL DAN TIM KUNJUNGAN KERJA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

BAB III REKOMENDASI

**DAFTAR NAMA
KUNJUNGAN KERJA RESES
KOMISI VIII DPR RI
KE KOTA SOLO, PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL 1-5 AGUSTUS 2022**

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URUT	ANG G				
1.	003	H. MARWAN DASOPANG	Ketua Tim	PKB	SUMUT II
2.	A-107	LAKSDYA TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, MPA.	Wakil Ketua	GERIND RA	JATIM II
3.	A-172	SELLY ANDRIANY GANTINA	Anggota	PDIP	JABAR VIII
4.	A-186	PARYONO, S.H., M.H.	Anggota	PDIP	JATENG IV
5.	A-218	INA AMMANIA	Anggota	PDIP	JATIM VII
6.	A-203	MY ESTI WIJAYATI	Anggota	PDIP	D.I.Y
7.	A-272	H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.	Anggota	GOL KAR	SUM BAR II
8.	A-346	Dra. Hj. IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE, M.H.	Anggota	GOL KAR	GO RON TALO
9.	A-004	H. ABDUL WAHID, S.Pd.I, M.Si.	Anggota	GERIND RA	JATENG II
10.	A-062	M. HUSNI, S.E., M.M.	Anggota	GERIND RA	SUMUT I
11.	A-354	Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTTr.	Anggota	NAS DEM	SUM BAR I
12.	A-014	H. MAMAN IMANUL HAQ	Anggota	PKB	JABAR IX
13.	A-552	WASTAM	Anggota	DEMOKR AT	JATENG VIII
14.	A-437	H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I.	Anggota	PKS	JABAR IX
15.	A-503	Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN	Anggota	PAN	D.I.Y
16.	A-510	H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si.	Anggota	PAN	BAN TEN III
17.	A-468	K.H. MUSLICH ZAINAL ABIDIN	Anggota	PPP	JATENG IV

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 telah membentuk Tim Kunjungan Kerja ke Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

B. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) Pasal 98 Ayat (4) huruf f. tentang Tugas Komisi di Bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
3. Keputusan DPR RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 59 Ayat (4) tentang Tugas Komisi di Bidang Pengawasan; dan
 - c. Pasal 60 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI pada Masa Reses.
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
 - a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah maupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana.
 - b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
2. Tujuan
 - a. Secara umum untuk mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pelaksanaan program pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana.

- b. Secara khusus untuk mengetahui kinerja Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah; Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

D. Objek Kunjungan Kerja

1. Pertemuan dengan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Walikota Surakarta, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Kadinsos Provinsi Jawa Tengah dan Kadinsos Kota Surakarta, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Kepala BPBD Kota Surakarta, Kapolda Jawa Tengah, BAZNAS Prov. Jawa Tengah, serta tokoh masyarakat.
2. Peninjauan lapangan ke Asrama Haji Embarkasi Donohudan Solo
3. Peninjauan ke Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Jawa Tengah.

BAB II

PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah, Walikota Surakarta, dan SKPD

Sesuai dengan agenda acara yang telah disusun dan dikomunikasikan ke pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, maupun kepada para mitra kerja yang menjadi obyek kunjungan kerja, maka pada tanggal 1 Agustus 2022, Tim Kunjungan Kerja melakukan pertemuan dengan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Walikota Surakarta, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Kadinsos Provinsi Jawa Tengah dan Kadinsos Kota Surakarta, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Kepala BPBD Kota Surakarta, Kapolda Jawa Tengah, BAZNAS Prov. Jawa Tengah, serta tokoh masyarakat. Tempat pertemuan di Balaikota Surakarta.



Dalam pertemuan tersebut Ketua Tim Kunjungan Kerja menyampaikan mengenai maksud dan tujuan kunjungan kerja, yaitu sebagai bentuk pengawasan terhadap mitra kerja Komisi VIII DPR RI dan pelaksanaan APBN bidang agama, sosial,

bencana, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Selain itu, sebagai upaya untuk mendapatkan aspirasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Komisi VIII DPR RI sebagai bahan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi tupoksi Komisi VIII DPR RI. Ketua Tim, H. Marwan Dasopang, juga menyampaikan beberapa poin penting perhatian Komisi VIII DPR RI, di antaranya menyangkut implementasi UU Pesantren di daerah, anggaran APBD untuk guru ngaji di Jawa Tengah dapat menjadi contoh daerah lain bagaimana Pemerintah Daerah dapat berkontribusi untuk merespon dukungan terhadap pesantren. Selain itu, masalah biaya haji yang terdapat penambahan biaya di tahun 2022 turut menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI dan mengharap masukan atas hal tersebut dari masyarakat Jawa Tengah. Di bidang sosial, masalah verifikasi data kemiskinan dan graduasi kemiskinan PKH. Di bidang kebencanaan, Komisi VIII DPR RI mendukung penguatan BNPB melalui upaya revisi Undang-undang Kebencanaan namun tidak memperoleh titik temu dengan Pemerintah, sehingga pembahasan RUU tersebut dihentikan. Masalah potensi zakat di daerah dan pengelolaan dana untuk kesejahteraan umat menjadi hal yang patut untuk didiskusikan pula dalam kesempatan diskusi.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bpk. Musta'in Ahmad merespon beberapa hal penting yang disampaikan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja tersebut. Ia menyampaikan mengenai cakupan UU pesantren yang terdiri dari aspek pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan. Diperlukan dukungan dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan hal tersebut, terutama aspek pendanaan atau anggaran dalam mendukung pengembangan pesantren sesuai amanat Undang-Undang. Saat ini di tingkat provinsi maupun di beberapa kabupaten/kota, sedang dibahas raperda untuk dukungan terhadap pesantren. Namun, terdapat kendala adanya Permendagri Nomor 82 Tahun 2021 mengenai tata keuangan dukungan pesantren dan madrasah.

Penyelenggaraan Ibadah Haji di tahun 1443 H/2022 di wilayah Jawa Tengah berjalan dengan baik, baik di embarkasi haji pada pemberangkatan dan pemulangan maupun selama di Arab Saudi. Terdapat beberapa masalah kecil, namun dapat dimitigasi dan berjalan lancar. Jawa Tengah memberangkatkan 43 kloter jemaah haji dan saat ini sedang dalam proses kepulangan. Adanya kenyataan peningkatan Biaya Haji (Bipih) harus dipertimbangkan jika ada kenaikan. Perlu sosialisasi yang baik tentang masalah biaya haji kepada para jemaah haji.

Di wilayah Kota Surakarta sendiri, penyelenggaraan ibadah haji dilakukan melalui pelayanan pendaftaran, pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Calon Haji. Di tahun 2022 Kota Surakarta memberangkatkan 270 jemaah haji, yang terdiri dari:

JAMAAH HAJI BERDASARKAN JENIS KELAMIN		
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI - LAKI	112
2	WANITA	158
JUMLAH		270

JAMAAH HAJI BERDASARKAN USIA		
NO	RENTANG USIA	JUMLAH
1	21 - 30	3
2	31 - 40	16
3	41 - 50	68
4	51 - 60	140
5	61 - 65	43
JUMLAH		270

Di bidang sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa kondisi penanganan Kesejahteraan Sosial, khususnya di Kota Surakarta sudah sangat bagus, hampir semua warga yang masuk dalam data kemiskinan tercover bansos pusat seperti PKH dan BPNT, bahkan untuk Kartu Indonesia Sehat warga kota Surakarta juga terus digiring Pemkot supaya memiliki KIS untuk jaminan kesehatan. Untuk data kemiskinan juga cukup terukur dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan.

Sesuai dengan SK tahap 4 tahun 2021 jumlah KPM PKH Kota Surakarta sejumlah 18.239 KPM. Adapun untuk tahun 2022 jumlah KPM PKH Kota Surakarta sejumlah 21.116 KPM. Untuk program Graduasi PKH di kota surakarta sebanyak 539KPM, yang terdiri dari:

- a. Sejahtera Mandiri: 107 KPM
- b. Sejahtera: 2 KPM
- c. Pindah Alamat: 2 KPM
- d. Alamiah: 410 KPM

- e. Ganda: 8 KPM
- f. Tidak Ditemukan: 1 KPM

Jumlah SDM PKH, TKSK, dan SDM Kesejahteraan Sosial lainnya di Kota Surakarta pada tahun 2022 sebanyak lima puluh dua orang, TKSK lima orang, dan Pekerja sosial sebanyak dua orang. Kendala yg ditemukan ketika di daerah perkotaan mobilitas masyarakat sangat tinggi sehingga terus berpindah-pindah dan tidak domisili sesuai alamat di KTP sehingga kesulitan mencari tempat tinggalnya. Hal tersebut menjadi permasalahan dalam pendataan kemiskinan di wilayah Kota Surakarta.

Kepala Dinas Sosial juga menyampaikan beberapa usulan atau aspirasi terkait bidang sosial, di antaranya:

1. Perlu ada pelatihan untuk operator SIKS NG
2. Penambahan kuota Bansos
3. Adanya jalur khusus untuk ODGJ dan OT untuk mendapatkan KIS PBI JK
4. Kebutuhan SDM itu supaya lokasinya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah sehingga berdasarkan kebutuhan wilayah bukan berdasarkan KTP SDM
5. Jumlah SDM untuk Kota Surakarta ditambah
6. Kesejahteraan SDM bisa ditingkatkan

Di bidang kebencanaan, cuaca ekstrem yang terjadi beberapa bulan terakhir sampai dengan saat ini masih menimbulkan ancaman bencana di Kota Surakarta seperti:

- 1) Banjir di Kelurahan Sondakan, Pajang, Bumi, Panularan, Tipes, Purwosari, Pucangsawit, dan Joyosurandan
- 2) Longsor di Kelurahan Panularan, Pajang dan Sondakan berupa talud efek dari gerusan air sungai
- 3) Angin kencang yang menimbulkan banyak pohon tumbang di Kelurahan Ketelan, Nusukan, Manahan, Laweyan, Pucangsawit, Mojosongo, Tipes dan Joyosuran.

Jenis ancaman yang paling sering terjadi adalah banjir. Terjadi biasanya karena curah hujan yang tinggi maupun air kiriman dari daerah penyangga seperti Boyolali. Adapun upaya yang dilakukan BPBD dalam rangka menanggulangi bencana, di antaranya:

- 1) Dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD melaksanakan sosialisasi, edukasi, simulasi dan menyebarkan informasi kebencanaan ke seluruh lapisan masyarakat baik dari dunia pendidikan sampai dengan masyarakat umum, menyampaikan informasi rawan bencana melalui social media, dan melaksanakan Gladi kebencanaan.

- 2) Dalam pelaksanaan darurat bencana BPBD membuat Posko Darurat Bencana dan juga Dapur Umum, serta membantu warga terdampak dengan evakuasi dan penyelamatan serta mendistribusikan bantuan logistik.
- 3) Dalam pasca bencana BPBD berkoordinasi dengan instansi terkait untuk merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum dan pembangunan rumah kembali yang terdampak bencana.

Berikut ini adalah rekap kejadian bencana di Kota Surakarta sepanjang tahun 2022:

NO	HARI, TANGGAL	KEJADIAN	LOKASI KEJADIAN	TERDAMPAK
1	Sabtu, 01 Januari 2022	Banjir	Mutihan Rt 05/11, Sondakan, Laweyan	8 KK
			Bratan Rt 01/09, Pajang, Laweyan	5 KK
			Songgalan Rw 04, Pajang, Laweyan	8 KK
			Totosari Rt 01 Rw 14, Pajang, Laweyan	20 KK
2	Jumat, 21 Januari 2022	Banjir	Pajang Rt 01 Rw 04	5 KK
			Pajang Rt 03 Rw 04	8 KK
			Bumi Rw 05	50 KK
			Bumi Rw 06	53 KK
			Bumi Rw 07	8 KK
			Panularan Rt 01 Rw 02	11 KK
			Panularan Rt 02 Rw 02	10 KK
			Panularan Rt 03 Rw 02	7 KK
			Panularan Rt 04 Rw 02	47 KK
			Pajang Rt 08 Rw 10	38 KK
			Pajang Rt 01 Rw 14	67 KK
			Tipes Rw 11	15 KK
			Tipes Rw 13	31 KK
			Tipes Rt 03 Rw 15	30 KK
Wonorejo Rt 02 Rw 02, Pajang	4 KK			
3	Minggu, 23 Januari 2022	Talud Longsor	Jl. Bhayangkara, Panularan (bunderan baron)	
4	Kamis, 27 Januari 2022	Pohon Tumbang	Jl. Rm Said (timur kelurahan ketelan)	
5	Jumat, 28 Januari 2022	Pohon Tumbang	Pajangan Rt 05 Rw 12, Pajang	4 KK
4	Jumat, 04 Februari 2022	Talud Longsor	Todipan Rt 03 Rw 06, Purwosari	10 KK
5	Jumat, 11 Februari 2022	Banjir	Todipan Rt 04 Rw 06, Purwosari	8 KK
			Pucangsawit Rt 01 Rw 04, Jebres	6 KK
			Pucangsawit Rt 03 Rw 04, Jebres	38 KK

			Pucangsawit Rt 02 Rw 05, Jebres	12 KK
			Jl. Kolonel Sutarto (depan vokasi UNS)	
		Pohon Tumbang	Joyosuran Rt 01 Rw 07	3 KK
6	Rabu, 16 Februari 2022	Banjir	Joyosuran Rt 02 Rw 07	20 KK
			Pajang Rt 02 Rw 14	3 KK
			Pajang Rw 04	2 KK
			Pajang Rt 01 Rw 12	1 KK
		Jl. Dr Wahidin (depan SMK Murni)		
		Pohon Tumbang	Jl. Ahmad Yani (belakang balaikambang)	
	Selasa, 22 Februari 2022	Pohon Tumbang	Nayu Barat Rt 02 Rw 13, Nusukan	1 KK
7	Kamis, 24 Februari 2022	Talud Longsor	Jl. KH Agus Salim no.17	
	Jumat, 25 Februari 2022	Pohon Tumbang	Alun-Alun Utara (dpn masjid agung)	
8	Jumat, 18 Maret 2022	Pohon Tumbang	Jl. Tirtorejo Utara Rt 05 Rw 03, Laweyan	1 KK
9	Kamis, 24 Maret 2022	Talud Longsor	Pajang Rt 06 Rw 10, Laweyan	1 KK
10	Minggu, 17 April 2022	Atap Roboh	Jl. Walanda Marimis (Pasar Mebel)	24 Kios
11	Selasa, 3 Mei 2022	Kebakaran	Jl. Semangka no.18 Rt 03 Rw 10, Kerten	
12	Rabu, 11 Mei 2022	Kebakaran	Jl. Hasanudin no.22, Purwosari	
13	Sabtu, 14 Mei 2022	Pohon Tumbang	Jl. Sam Ratulangi no.7, Manahan	
			Jl. Sumbing Raya, Mojosongo	
			Jl. Veteran, Tipes	
			Jl. Mentri Supeno (depan kantor DLH)	
14	Senin, 16 Mei 2022	Pohon Tumbang	Taman makam Pahlawan Jurug	
15	Minggu, 12 Juni 2022	Pohon Tumbang		

Strategi Jangka Panjang BPBD Kota Surakarta dalam rangka memitigasi dan mengatasi terjadinya bencana hidrometeorologi sekaligus meminimalisasi jumlah korban jiwa maupun materi, dilakukan dengan beberapa kegiatan, di antaranya:

- a. Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana
- b. Menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana untuk dapat mengetahui bahaya potensi bencana yang terjadi di Kota Surakarta

- c. Menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagai pedoman kota dalam upaya meminimalisir jumlah korban jiwa maupun materi
- d. Menyusun dokumen Rencana Kontijensi sebagai pedoman saat tanggap darurat bencana hidrometeorologi
- e. Membentuk Tim Reaksi Cepat tingkat Kota Surakarta
- f. Membentuk DESTANA di Kawasan rawan Bencana.

Di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan bahwa dalam koordinasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lintas kota/kabupaten maupun provinsi tidak ada kendala berarti. Koordinasi dapat dilaksanakan melalui online maupun secara offline melalui rapat koordinasi. Selama ini sudah kerjasama antara UPT. PTPAS sebagai unit layanan di tingkat kota Surakarta sudah terjalin sangat baik dengan PPT Provinsi Jawa Tengah selaku unit layanan di tingkat provinsi.

Adapun kendala yang masih dirasakan adalah waktu penyelesaian kasus yang dirujuk ke Provinsi yang kadang agak lama, tetapi hal ini dikarenakan banyaknya kasus rujukan dari kab/kota ke provinsi. Beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di antaranya:

- a. Adanya Perda Perlindungan Anak No 4 tahun 2012 yang tahun ini akan direvisi di mana di dalamnya memuat mengenai pencegahan kekerasan pada anak dan pernikahan usia dini
- b. Adanya kerjasama dgn Pengadilan Agama bahwa setiap pasangan usia dini yg akan meminta rekomendasi dispensasi pernikahan harus melalui tahap konseling di Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) di DP3AP2KB. Konseling untuk pasangan yang akan menikah maupun orangtuanya.
- c. Edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan pernikahan dini melalui sosialisasi tatap muka, kampanye, media Massa, media sosial dll.
- d. Pembentukan PPT (Pos Pelayanan Terpadu) atau di kab/kota lain dikenal dengan Satgas PPA di 54 kelurahan se-kota Surakarta sebagai tangan panjang Dinas dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan koordinasi dengan unit PPA Polres Surakarta, maka data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan ke kepolisian berjumlah 13 kasus terdiri dari kasus perkosaan, persetubuhan, penganiayaan, pencurian dan lain-lain. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan usulan yaitu agar upaya sosialisasi yang terus-menerus mengenai UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar masyarakat dapat memahami UU tersebut secara komprehensif.

B. Kunjungan Lapangan ke Asrama Haji Donohudan



Setelah tim Kunjungan Kerja melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan di Jawa Tengah, selanjutnya dilakukan kunjungan lapangan ke Asrama Haji Donohudan yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tim Kunjungan Kerja melihat langsung fasilitas bangunan, ketersediaan kamar bagi jemaah haji, fasilitas pendukung seperti ruang makan, lapangan parkir, ruang pemberangkatan dan penerimaan kepulauan jemaah haji, masjid, dan fasilitas lainnya.

C. Peninjauan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta

Kegiatan selanjutnya adalah peninjauan ke Balai Besar Rehsos Prof. Dr. Soeharso di Surakarta. Tim Kunjungan Kerja berkesempatan berdialog dengan para penyandang disabilitas dan memberikan bantuan atensi bagi para penyandang disabilitas berupa bantuan modal, bantuan kaki palsu, dan bantuan lainnya dari kementerian sosial.



Di Balai Besar ini, Ketua Tim Kunjungan Kerja juga menyempatkan untuk melihat langsung fasilitas balai dan kegiatan di balai. Di antaranya meninjau pembuatan kursi roda, pembuatan kaki palsu, yang terdapat di Balai Besar tersebut.

BAB III

REKOMENDASI

Dari masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan bidang agama, sosial, bencana, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Tengah yang telah disampaikan kepada Tim Kunjungan Kerja, berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Komisi VIII DPR RI:

1. Perlu menjadi perhatian utama Komisi VIII DPR RI, terutama untuk Panja Pengawasan Pendidikan Keagamaan mengenai kesiapan Pemerintah Daerah lain dalam mengimplementasikan dukungan terhadap pesantren, terutama aspek dukungan anggaran dari APBD bagi peningkatan pesantren dan pengembangan SDM pesantren.
2. Perlu menjadi bahan pertimbangan mengenai masukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat yang ada di daerah tersebut mengenai peningkatan biaya haji yang harus menjadi perhatian pada saat pembahasan BPIH. Jika terdapat peningkatan biaya harus disosialisasikan kepada jemaah haji agar tidak menjadi isu liar.
3. Perlu disampaikan kepada Menteri Sosial RI mengenai masukan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mengenai peningkatan pelatihan untuk operator SIKS NG, penambahan kuota Bansos bagi Provinsi Jawa Tengah, perlu adanya jalur khusus untuk ODGJ dan OT untuk mendapatkan KIS PBI JK, adanya kebutuhan peningkatan jumlah SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah sehingga berdasarkan kebutuhan wilayah bukan berdasarkan KTP SDM, serta peningkatan Kesejahteraan SDM Sosial.
4. Perlu disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengenai masukan dari Balai Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Anak Jawa Tengah mengenai perlunya peningkatan sosialisasi undang-undang mengenai kekerasan seksual agar lebih dipahami oleh masyarakat.

TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI